



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung

Telp. (0721) 704626 Fax. (0721) 704626

Transkrip Wawancara

Sikap Politik Anggota DPRD Terhadap Anggota DPRD Perempuan

di Lembaga Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung

A. Identitas Informan

1. Nama : Hambri Sugandi, SE, MH
2. Umur : 42 Tahun
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Fraksi : PAN
6. Jabatan : Anggota Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung
7. Pendidikan Terakhir : S2

Hasil Wawancara

Pewawancara : Apa pendapat Bapak tentang keterwakilan 30% perempuan di
Lembaga Legislatif?

Informan : Menurut saya keterwakilan 30% perempuan memang harus,
karena pada dasarnya masih terdapat ketergantungan pada
perempuan, dengan adanya perempuan ada penyejuk, karena

perempuan adalah suatu penyejuk baik itu dalam rumah tangga, perjalanan, pekerjaan, dan kita semua dilahirkan oleh perempuan. Dan yang sudah diatur oleh undang-undang dalam keterwakilan 30% perempuan wajin dipenuhi dan dilaksanakan.

Pewawancara : Menurut Bapak adakah syarat khusus yang harus dimiliki Caleg perempuan yang berasal dari partainya agar kuota 30% di Legislatif terpenuhi?

Informan : Pertama min SMA akan tetapi diutamakan S1, mempunyai wawasan yang cukup mengenai pemerintahan, dan kembali kepada kualitas individu itu sendiri.

Pewawancara : Menurut Bapak dengan adanya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif dapat meningkatkan kualitas kinerja anggota DPRD dan dapat memperjuangkan tentang kepentingan perempuan?

Informan : Jelas dapat meningkatkan kualitas kinerja anggota DPRD tersebut, dengan 30% keterwakilan perempuan itu dapat juga memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri, karena dengan adanya lebih banyak jumlahnya akan cenderung lebih dapat memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri.

Pewawancara : Didalam proses pemilu yang menempatkan perempuan sebagai anggota legislatif tidak mencapai kuota 30%, permasalahan tersebut dikaitkan dengan isu primordialisme serta kultur budaya oleh masyarakat. Sebagai anggota DPRD bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut?

Informan : Pemilih itu lebih banyak perempuan, perempuan juga bisa memimpin jika dia memiliki SDM yang bagus menguasai manajemen kepemimpinan, menguasai strategi pemerintahan. Dan saya pada dasarnya setuju perempuan memimpin itu tidak ada masalah.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh anggota DPRD agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif ?

Informan : Dengan Sosialisasi, menjalankan dan menyampaikan undang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut, untuk mensiasati agar kuota 30% itu dapat mencalonkan di partai dan dapat duduk di DPRD kota Bandar Lampung.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh partai Bapak agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif?

Informan : Pertama jika untuk di DPW, tingkat provinsi KPPW, tingkat kota KPPD merekrut dan mengevaluasi calon-calon di tingkat daerah kabupaten dan kota. Dengan adanya KPPD, KPPD wajib mencari dan menjaring serta memenuhi 30% perempuan, kemudian penetapan Dapil yang ditetapkan oleh KPU kemudian dipantau Dapil mana yang belum memenuhi kouta 30% perempuan. Dan salah satu cara mendukung keterwakilan perempuan dengan cara menempatkan di no urut teratas. Dan dalam PAN ada organisasi yang mendukung dan bergerak dibidang perempuan berhubungan dengan kouta 30% perempuan yaitu PUAN (Perempuan Amanat Nasional)

Pewawancara : Menurut Bapak pihak-pihak mana saja yang harus mengupayakan tercapainya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Seluruh pihak. Pertama dari Instansi pemerintah, instansi DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi, kemudian pengamat politik, universitas, dan yang terlebih utama seluruh Partai Politik, masyarakat, LSM juga dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai kuota 30% perempuan.

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan adanya Keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Sangat Setuju.